

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 serta Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD) adalah untuk penyelarasan usulan antaran hasil-hasil Musrembang Kecamatan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Perencanaan pembangunan salah satu hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga merupakan kerangka dasar otonomi daerah dan guna mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat maka perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan pada masyarakat perlu diberikan peluang serta peran serta dalam pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur yang menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 Perubahan.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

**RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023**



**SANGATTA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satpol PP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.

Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses penyusunan Perubahan Renja Satpol PP





Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun subkegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a) Berpedoman pada Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD;
- b) Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif PD;

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Perubahan, sejumlah peraturan telah digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur sebagai dasar yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);





- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);





- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025;





- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan (SPM) Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

1950





1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi **Program-Program Prioritas Tentang Penerapan (SPM) Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada Renstra yang menjadi arah dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sekaligus sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Kutai Timur adalah mendeskripsikan tentang program- program prioritas Sesuai Dengan **Penerapan (SPM) Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari Tingkat Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Tingkat Desa dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dilakukan setelah menerima Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor 2069/050/B.5/XII/2021 tentang Kalender, Jadwal dan Tahapan Kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan daerah Tahun 2023 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. dan berpedoman pada :





1. Seluruh perangkat daerah Menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023.
2. Perangkat daerah tetap memperhatikan belanja prioritas yang harus dialokasikan dalam APBD-P 2023, antara lain : Pemenuhan alokasi belanja ASN (Gaji dan TPP), alokasi belanja PPPK (Gaji dan TPP), alokasi belanja Gaji TK2D, serta pemenuhan belanja daerah terarah (DAK dan Bankeu Provinsi).
3. Perangkat daerah memperhatikan hasil evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan dan sub kegiatan melalui aplikasi TEPPRA.
4. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022, tetap berkoordinasi dengan BAPPEDA sesuai dengan garis Koordinasinya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Penulisan Rencana Kerja Adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV PENUTUP



**BAB II****EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

FORMAT I.H
EVALUASI HASIL RENJA PD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BULAN APRIL
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NAMA OPD : SATPOL PP KAB. KUTAI TIMUR

Kode	Perangkat daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/Kehidupan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja	
					Triwulan 1	
			K	RP	K	RP
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja			11,533,170,537	8%	971,108,971
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja			11,533,170,537	8%	971,108,971
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Satpol PP	50	%	6,680,372,605	971,108,971
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Satpol PP	55	%		
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Satpol PP	50	%	165,000,000	-
		Capaian Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	50	%		
1.05.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dikerjakan	6	Dokumen	25,000,000	0





1.05.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Dikerjakan	1	Dokumen	40,000,000	0	-
1.05.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Dikerjakan	1	Dokumen	15,000,000	0	-
1.05.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	25,000,000	0	-
1.05.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Dikerjakan	1	dokumen	25,000,000	0	-
1.05.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang Dikerjakan	1	Dokumen	20,000,000	0	-
1.05.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Keg	15,000,000	0	-
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9,540,170,537	10%	971,108,971
1.05.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	7,405,050,230	3	673,142,781
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	47	Orang		47	
1.05.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Tenaga Honorer Pol PP	7	Bulan	1,870,120,307	2	297,966,190
1.05.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	12	Orang	217,999,200	0	-
			12	Bulan		0	
1.05.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan (Kwitansi, BKU, Jurnal Umum, Buku Besar, Rincian Objek, Fungsional, Administratif, Register Penutupan Kas, BAPK)	9	Dokumen	9,400,160	0	-



1.05.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang dikerjakan	1	Dokumen	9,400,160	0	-
1.05.001.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	Dokumen	9,400,160	0	-
1.05.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Semesteran	4	Dokumen	9,400,160	0	-
1.05.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	Dokumen	9,400,160	0	-
1.05.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah	6	Dokumen	10,000,000	0	-
1.05.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD	1	Dokumen	10,000,000	0	-
1.05.001.2.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen hasil Penilaian dan Penafsiran	1	Dokumen	-	0	-
1.05.001.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Dokumen Laporan barang milik daerah	4	dokumen	-	0	-
1.05.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	%	60,000,000	0%	-
1.05.001.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai	12	Bulan	-	0	-
1.05.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Jenis Pakaian Dinas	-	0	-
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132	Orang		0	



1.05.001.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Daftar Nominatif Satpol PP	2	Daftar	-	0	-
1.05.001.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentasi Monitoring dan Evaluasi Aparatur Satpol PP	12	Kali	60,000,000	0	-
1.05.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5	Aparatur		0	-
		Pelatihan dan Pendidikan PTI Satpol PP	2	Aparatur		0	
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	50	%	200,000,000	0	-
1.05.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik dan Lampu Penerangan kantor	20	Buah	-	0	-
		Instalasi Jaringan Listrik pemasangan Jaringan Khusus Kantor Satpol PP	1	Kegiatan		0	
1.05.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	7	Unit	-	0	-
1.05.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100	Persen	10,000,000	0	-
1.05.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	kali	190,000,000	0	-
1.05.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	0	-
1.05.001.2.07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website Informasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Online	1	Paket	-	0	-
1.05.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gudang Peralatan dan Perlengkapan	1	Bangunan	-	0	-





		Satpol PP					
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	12	Bulan	130,000,000	0	-
1.05.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Listrik, Internet dan Air di SKPD	12	Bulan	110,000,000	0	-
1.05.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Taman	1	Orang / bulan	-	0	-
1.05.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum, Jasa Kebersihan, jasa Perbaikan Peralatan Kantor	100	Persen	20,000,000	0	-
		Jumlah Cleaning Service yang Dibayar gajinya	1	Orang/Bulan		0	
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	50	%	40,000,000	0	-
1.05.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional atau lapangan	10	Unit	40,000,000	0	-
1.05.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor yang di rehabilitasi	1	Kantor	-	0	-
		Mess Satpol pp yang direhabilitasi	1	Mess Satpol		0	
		Musholla Satpol PP	1	Mushalla		0	
1.05.001.2.13	Penataan Organisasi				-	0	-
1.05.001.2.13.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	1	Dokumen	-	0	-
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	65	%	1,318,000,000	0	-





1.05.002.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	918,000,000	0	-
1.05.002.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	12	Kali	120,000,000	0	-
		Jumlah Kegiatan Pengamanan	6	Kali		0	
		Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	34	Personil		0	
		Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	24	Kali		0	
		Jumlah Daerah Rawan Trantibum	30	Lokasi		0	
		Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, dan PTI	57	Personil		0	
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Din	15	Kali		0	
1.05.002.2.01.002	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan dan ketertiban umum berdasarkan PERDA dan PERKADA melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa	100	Persen		0	-
1.05.002.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Kerjasama Instansi Vertikal	2	Kegiatan	70,000,000	0	-





1.05.002.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	100	Persen	70,000,000	0	-
		Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	100	Persen		0	
		Persentase Aparatur Non Struktural yang mengikuti Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP	100	Persen		0	
1.05.002.2.01.008	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142	Stel	658,000,000	0	-
		Tersedianya Mobil Pengangkut Pasukan	1	Unit			
1.05.002.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	260,000,000	0	-
1.05.002.2.02.001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	18	Kecamatan	120,000,000	0	-
1.05.002.2.02.002	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	6	Kasus	70,000,000	0	-
1.05.002.2.02.003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas pelanggaran PERDA dan PERBUB	100	Persen	70,000,000	0	-
1.05.002.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan karir PPNS	2	PPNS	140,000,000	0	-

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

1.05.002.2.03.001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PNS Pol PP yang Memiliki SKEP PPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Personil	140,000,000	0	-
-------------------	--	---	---	----------	-------------	---	---



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023



Laporan Evaluasi Renja Triwulan 2 Periode Bulan April 2023 Satuan Polisi Pamong Praja																
Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Das Paga 2022		Target Kinerja Das Paga 2023		Realisasi 2023				Tingkat Capaian		Predik at		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
				K	R	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja			0	0	0	15,267,378,068.00	8.20%	313,155,624.00	16.17%	1,325,658,608.00	12	SR			
5.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja			0	0	0	15,267,378,068.00	8.20%	313,155,624.00	16.17%	1,325,658,608.00	5	SR			
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Satpol PP	positif	0	%	0	36 %	0	12,117,378,068.00	0	840,335,336.00	15	SR			
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	positif	0	Dokumen	0	3	Dokumen	593,520,000.00	0	5,146,800.00	0	SR			
1.05.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	0	Dokumen	0	3	Dokumen	56,020,000.00	0	8,613,600.00	0	SR			
1.05.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perub	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perub	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	positif	0	Laporan	0	2	Laporan	443,500,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	20,000,000.00	1,680,000.00	-	0	SR			
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	positif	0	Dokumen	0	10	Dokumen	3,432,638,158.00	688,347,303.00	1,325,658,608.00	20	SR			
1.05.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif	0	Orang/bulan	0	43	Orang/bulan	7,006,360,328.00	43	761,937,058.00	21	SR			
1.05.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1,800,397,140.00	573,704,360.00	421,852,180.00	23	SR			
1.05.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	270,000,000.00	42,254,400.00	-	0	SR			
1.05.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	51,450,030.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan K	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	115,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.02.006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Taggungan Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Bahan Taggungan Pemeliharaan dan Tindak Lanjut Pemeliharaan	positif	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	-	-	0	SR			
1.05.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyus	positif	0	Laporan	0	4	Laporan	218,810,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	30,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	positif	0	Dokumen	0	6	Dokumen	30,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	10,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.03.002	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik D	positif	0	Laporan	0	3	Laporan	10,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.03.003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	0	Laporan	0	2	Laporan	10,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	positif	0	%	0	65 %	0	1,238,219,310.00	29,436,620.00	-	0	SR			
1.05.001.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	positif	0	Unit	0	1	Unit	20,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.05.002	Pengadaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapan	positif	0	Paket	0	2	Paket	500,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.05.003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	418,219,310.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.05.004	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	100,000,000.00	27,193,200.00	-	0	SR			
1.05.001.2.05.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	0	Orang	0	5	Orang	200,000,000.00	31,674,040.00	-	0	SR			
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	0	%	0	60 %	0	360,000,000.00	54,717,368.00	-	0	SR			
1.05.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	20	Paket	5,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.06.002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	70,000,000.00	24,714,770.00	-	0	SR			
1.05.001.2.06.003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	0	Paket	0	10	Paket	5,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	20	Paket	20,000,000.00	7,850,000.00	-	0	SR			
1.05.001.2.06.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	0	Laporan	0	20	Laporan	220,000,000.00	73,340,000.00	-	0	SR			
1.05.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	40,000,000.00	1,735,004.00	-	0	SR			
1.05.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	0	Unit	0	3	Unit	-	-	-	0	SR			
1.05.001.2.07.003	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	positif	0	Unit	0	0	Unit	-	-	-	0	SR			
1.05.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	0	0	Unit	-	-	-	0	SR			
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	0	Bulan	0	12	Bulan	147,000,000.00	38,308,648.00	-	0	SR			
1.05.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	0	Laporan	0	3	Laporan	117,000,000.00	64,617,236.00	-	0	SR			
1.05.001.2.08.005	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	0	Laporan	0	0	Laporan	-	-	-	0	SR			
1.05.001.2.08.006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	30,000,000.00	12,000,000.00	-	0	SR			
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	positif	0	%	0	50 %	0	210,000,000.00	23,538,570.00	-	0	SR			
1.05.001.2.09.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Per	positif	0	Unit	0	26	Unit	150,000,000.00	47,671,140.00	-	0	SR			
1.05.001.2.09.005	Pemeliharaan/Rahabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	0	Unit	0	2	Unit	60,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.13	Pertanian Organisasi	Capaian Pertanian Organisasi Perangkat Daerah	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	40,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.001.2.13.003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	40,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tertelaksananya Peningkatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	positif	0	Persen	0	68	Persen	3,150,000,000.00	73,353,688.00	-	0	SR			
1.05.002.2.01	Pengamanan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu	positif	0	Persen	0	68	Persen	2,600,000,000.00	35,247,200.00	-	0	SR			
1.05.002.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini da	positif	0	Kasus	0	120	Kasus	330,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.01.002	Pemindakan atau Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melal	positif	0	Kasus	0	120	Kasus	150,000,000.00	38,436,000.00	-	0	SR			
1.05.002.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum d	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	100,000,000.00	26,493,200.00	-	0	SR			
1.05.002.2.01.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keta	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	100,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan K	positif	0	Orang	0	40	Orang	100,000,000.00	5,493,200.00	-	0	SR			
1.05.002.2.01.006	Kerjasama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Penceg	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	100,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.01.008	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	positif	0	Unit	0	1	Unit	1,500,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.01.009	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dim	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	20,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.01.010	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengenaan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengenaan Peraturan Daerah dan Perka	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	100,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.02	Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	positif	0	%	0	68 %	0	400,000,000.00	38,112,488.00	-	0	SR			
1.05.002.2.02.001	Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Peraturan Daerah/Perkada kepada Masyarakat/Kota	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	100,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.02.002	Pengawasan atau Kapastian terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kapastian Terhadap Pel	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	100,000,000.00	19,606,800.00	-	0	SR			
1.05.002.2.02.003	Pengawasan atau Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubel	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	200,000,000.00	56,618,176.00	-	0	SR			
1.05.002.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyel	positif	1	Laporan	0	1	Laporan	150,000,000.00	-	-	0	SR			
1.05.002.2.03.001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyel	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	150,000,000.00	-	-	0	SR			





BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan perubahan untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Prioritas di tahun 2024 yakni

1. Pengadaan Seragam Linmas dan Atribut Linmas.
2. Distribusi Seragam Linmas dan Atribut Linmas Pada 18 Kecamatan.
3. Penambahan pagu untuk memenuhi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Gaji TK2D .
4. Revisi Perda dan Perkada Trantibum yang dinilai perlukan untuk dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan penegakan perda.

Perubahan pagu indikatif yaitu penambahan dan pengurangan pagu pada 2 (dua) program. Adapun dua program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Perubahan tersebut meliputi penambahan /pengurangan pagu indikatif sub kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

Adapun Perubahan yang Diajukan adalah sebagai Berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Sebelum nya Rp. 599,520,000,- bertambah menjadi Rp. 639,520,000.

Penambahan senilai Rp. 40.000.000,- dinilai perlukan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja).



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Sebelum nya Rp. 9,492,638,158,- ,Setelah nya ada Penambahan menjadi Rp. 10,931,481,722,-.

Penambahan pada Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 404.629.888,- dan Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 1.034.213.67,- untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Gaji TK2D pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu semula Rp. 1,238,219,910,- terjadi penambahan menjadi Rp. 2,538,219,910,

Penambahan di peruntukkan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sebesar Rp. 300.000.000 dan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang dinilai sudah perlu dilakukan pengadaan pakaian dinas sesuai dengan permendagri terbaru dan pelaksanaan Bimtek pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

4. Penataan Organisasi, pagu semula Rp. 40.000.000,- terjadi penghapusan menjadi Rp. 0, dikarenakan Subkegiatan tidak berada pada kewenangan OPD terkait.

5. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu semula Rp. 2,500,000,000,- terjadi penambahan menjadi Rp. 8,621,228,231,

Penambahan di peruntukkan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sebesar Rp. 5.129.903.031,- dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 291.325.200,- dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp. 570.000.000,- dan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan





Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Sebesar Rp. 249.000.000,- dan.

Pengurangan Terjadi Pada Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Sebesar Rp. 49.000.000,- dan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Sebesar Rp. 70.000.000,-

Penambahan dan penyesuaian pagu yang dinilai sudah perlu dilakukan dalam pengadaan pakaian dinas LINMAS sesuai dengan permendagri terbaru dalam menghadapi pemilu Serentak di Tahun 2024.

6. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota Pagu Semula Rp. 400,000,000,- terjadi penambahan menjadi Rp. 1,950,000,000,-.

Penambahan di peruntukkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp. 250.000.000 dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sebesar Rp. 250.000.000,- dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sebesar Rp. 1.050.000.000 ,- yang dinilai sudah perlu dilakukan untuk Revisi PERDA dan PERKADA dan Operasional Sosialisasi dan Pengawasan PERDA dan PERKADA pada 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD									
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023																			

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13,625,470,871	1,541,907,197	0	0	15,167,378,068	21,010,547,187	4,566,902,676	0	0	25,577,449,863	10.410.071.795	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				11,971,694,198	145,683,870	0	0	12,117,378,068	14,664,465,792	191,755,840	0	0	14,856,221,632	2.738.843.564	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				563,272,164	36,247,836	0	0	599,520,000	603,272,164	36,247,836	0	0	639,520,000	40.000.000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		56,020,000	0	0	0	56,020,000	96,020,000	0	0	0	96,020,000	40.000.000	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		16,641,677	3,358,323	0	0	20,000,000	16,641,677	3,358,323	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		17,681,928	2,318,072	0	0	20,000,000	17,681,928	2,318,072	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		3,519,859	16,480,141	0	0	20,000,000	3,519,859	16,480,141	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta		443,500,000	0	0	0	443,500,000	443,500,000	0	0	0	443,500,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kinerja SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)		Utara													
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		5,908,700	14,091,300	0	0	20,000,000	5,908,700	14,091,300	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,422,485,299	70,152,859	0	0	9,492,638,158	10,866,377,407	65,104,315	0	0	10,931,481,722	1.438.843.564	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		7,006,980,928	0	0	0	7,006,980,928	7,411,610,816	0	0	0	7,411,610,816	404.629.888	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		1,800,397,140	0	0	0	1,800,397,140	2,834,610,816	0	0	0	2,834,610,816	1.034.213.676	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		270,000,000	0	0	0	270,000,000	270,000,000	0	0	0	270,000,000	0	
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		16,700,000	34,750,090	0	0	51,450,090	16,700,000	34,750,090	0	0	51,450,090	0	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		94,346,125	20,653,875	0	0	115,000,000	97,389,737	17,610,263	0	0	115,000,000	0	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		206,066,038	12,743,962	0	0	218,810,000	206,066,038	12,743,962	0	0	218,810,000	0	
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta		27,995,068	2,004,932	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan Polisi Pamong Praja)		Utara, Sangatta Utara													
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
1	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,207,476,660	30,743,250	0	0	1,238,219,910	2,452,807,226	85,412,684	0	0	2,538,219,910	1.300.000.000	
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		103,920	19,896,080	0	0	20,000,000	103,920	19,896,080	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		489,152,830	10,847,170	0	0	500,000,000	786,983,396	13,016,604	0	0	800,000,000	300.000.000	
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		418,219,910	0	0	0	418,219,910	1,365,719,910	52,500,000	0	0	1,418,219,910	1.000.000.000	
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Kutai Timur,		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Satuan Polisi Pamong Praja)	(PAD)	Sangatta Utara, Sangatta Utara													
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				351,460,075	8,539,925	0	0	360,000,000	355,008,995	4,991,005	0	0	360,000,000	0	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		66,451,080	3,548,920	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		8,995	4,991,005	0	0	5,000,000	8,995	4,991,005	0	0	5,000,000	0	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		220,000,000	0	0	0	220,000,000	220,000,000	0	0	0	220,000,000	0	
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147,000,000	0	0	0	147,000,000	147,000,000	0	0	0	147,000,000	0	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		117,000,000	0	0	0	117,000,000	117,000,000	0	0	0	117,000,000	0	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Kutai Timur,		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Umum Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	(PAD)	Sanggatta Utara, Sanggatta Utara													
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210,000,000	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	0	210,000,000	0	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
1	05	01	2.13		Penataan Organisasi				40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	(40.000.000)	
1	05	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	(40.000.000)	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1,653,776,673	1,396,223,327	0	0	3,050,000,000	6,346,081,395	4,375,146,836	0	0	10,721,228,231	7.671.228.231	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,105,117,541	1,394,882,459	0	0	2,500,000,000	4,247,422,263	4,373,805,968	0	0	8,621,228,231	6.121.228.231	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			330,000,000	0	0	0	330,000,000	900,000,000	0	0	0	900,000,000	570.000.000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/ Kota,		150,000,000	0	0	0	150,000,000	399,000,000	0	0	0	399,000,000	249.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Satuan Polisi Pamong Praja)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	387,592,780	3,732,420	0	0	391,325,200	291.325.200	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		100,000,000	0	0	0	100,000,000	2,165,537,438	3,064,365,593	0	0	5,229,903,031	5.129.903.031	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,805,665	1,394,194,335	0	0	1,500,000,000	145,292,045	1,305,707,955	0	0	1,451,000,000	(49.000.000)	
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara		99,311,876	688,124	0	0	100,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	(70.000.000)	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				400,000,000	0	0	0	400,000,000	1,950,000,000	0	0	0	1,950,000,000	1.550.000.000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	350,000,000	0	0	0	350,000,000	250.000.000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	350,000,000	0	0	0	350,000,000	250.000.000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	1,250,000,000	0	0	0	1,250,000,000	1.050.000.000	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				148,659,132	1,340,868	0	0	150,000,000	148,659,132	1,340,868	0	0	150,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		148,659,132	1,340,868	0	0	150,000,000	148,659,132	1,340,868	0	0	150,000,000	0	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Timur,

Didi Herdiansyah

NIP 19630923 198303 1 007

